

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
--	---

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	Persentase	100	20	20	20
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT	Persentase	100	40	40	40
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85	30	30	35,29
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,7 dari 4	120

	dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	92	40	40	43,47

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat

Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan

keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi regional yang menghasilkan komitmen konkret.

Efektivitas kerja sama ekonomi regional diukur berdasarkan jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati. Komitmen tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan negara mitra pada forum regional di mana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator dan ketua pelaksanaannya.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2025 sebanyak 5 Komitmen sebagai berikut:

1. Komitmen Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
2. Komitmen Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
3. Komitmen Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
4. Komitmen Hasil BIMP-EAGA Summit ke-17;
5. Komitmen Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah Komitmen}}{\text{Target Komitmen (5)}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 20% ditentukan berdasarkan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2026 dan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati yang telah terealisasi sebesar 20% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati Petrokimia yang mencapai target	Persentase	100%	20%	20% (Memuaskan)

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati merupakan *direct cascading* dari Indikator Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen. IKU ini ditargetkan sebesar 100%. Sampai dengan laporan ini disusun, komitmen yang disepakati pada kerja sama ekonomi regional telah terlaksana sebesar 20%.

Komitmen yang Disepakati pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Hasil Pertemuan AEC Council ke-27

Pertemuan ASEAN *Economic Community* (AEC) Council telah dilaksanakan dalam rangkaian KTT ASEAN ke-48 pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Pertemuan dipimpin oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026 dan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku AEC Council Indonesia. Turut hadir menjadi delegasi RI yakni perwakilan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

Adapun hasil pertemuan antara lain:

- Pertemuan mencatat penyelesaian perundingan *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang telah mencapai 87% berstatus *concluded*, dengan 24 paragraf tersisa. Pertemuan membahas penyelesaian isu-isu kritis DEFA, dengan target penyelesaian seluruh artikel oleh ASEAN DEFA *Negotiating Committee* pada Mei 2026 dilanjutkan dengan proses *legal scrubbing* dan penandatanganan pada KTT ASEAN ke-49 bulan November 2026.
- Pertemuan mencatat *endorsement* terhadap *Concept Note on Boosting ASEAN's financing capacity towards ASEAN Vision 2045*, yang bertujuan untuk mentransformasi kemitraan ASEAN–ADB menjadi lebih strategis, terstruktur, dan berjangka panjang dalam mengedepankan implementasi proyek ASEAN.
- Pertemuan juga mencatat penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) ASEAN–ADB periode 2026–2030. MoU bertujuan untuk mempercepat proses *Regional Cooperation and Integration* (RCI) di ASEAN melalui pemanfaatan keunggulan komparatif masing-masing pihak terkait. Saat ini MoU sedang direviu oleh *Committee of Permanent Representative* (CPR) dengan target penandatanganan oleh Sekjen ASEAN dan Presiden ADB pada tahun 2026.
- ASEAN menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat pada 2025 dengan pertumbuhan mencapai 4,9%, mencerminkan solidnya kondisi ASEAN di tengah tekanan global. Menanggapi situasi ekonomi global saat ini, Para Menteri ASEAN sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong langkah kolektif untuk memperkuat ketahanan kawasan.
- Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan yakni: 1) Perkembangan Penyelesaian PED Filipina; 2) *AEC Blueprint 2025 Implementation*; 3) *ASEAN Community Vision 2045 and AEC Strategic Plan 2026-2030*; dan 4) *AEC Works on Cross-Cutting Agenda*; serta 5) Perkembangan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

2. Komitmen Hasil BIMP-EAGA Special Summit 2026

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istimewa BIMP-EAGA 2026 telah dilaksanakan tanggal 7 Mei 2026, di Shangri-La, Cebu, Filipina, sebagai bagian dari rangkaian KTT Ke-48 ASEAN. Pertemuan dihadiri oleh para pemimpin negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan bertujuan untuk mendukung Dokumen *Guideline Framework* BIMP-EAGA untuk sepuluh tahun ke depan dalam kerangka BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Presiden RI.

Pada KTT Istimewa BIMP-EAGA telah disepakati pernyataan bersama (*Leaders' Joint Statement*) yang berisi laporan perkembangan kerja sama BIMP-EAGA dan arahan serta kesepakatan para Kepala Negara.

Pada pertemuan ini Presiden RI menyampaikan bahwa interaksi dalam kerangka sub-regional seperti BIMP-EAGA harus berevolusi menjadi adaptif, berdampak, dan responsif secara langsung terhadap kebutuhan negara anggotanya. Presiden juga menyampaikan kebijakan nasional terkait keamanan energi, termasuk energi alternatif dan ketahanan pangan, serta secara khusus menggaris-bawahi arti penting penguatan UMKM, konektivitas, transformasi digital, dan realisasi APG.

KTT istimewa juga menyepakati BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035 sebagai panduan kerja sama pada tahun 2026-2035. KTT menghasilkan *Joint Statement* yang mencakup capaian BEV 2025, Visi S.O.A.R (*Socially inclusive, Open, Aligned and Resilient*), peningkatan investasi, pariwisata, Kontribusi terhadap ekonomi ASEAN, serta rencana Uni Eropa untuk menjadi mitra pembangunan BIMP-EAGA.

Proyeksi Triwulan II tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan II tahun 2025. Realisasi Triwulan II dapat tercapai sesuai dengan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2026 maka diprediksikan Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati dapat terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan,

			waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Rapat persiapan substansi pertemuan AEC Council ke-27 telah dilaksanakan pada 29 April 2026 secara <i>hybrid</i> .
2.	Menghadiri Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Pertemuan AEC Council ke-27 telah dilaksanakan pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina.
3.	Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Laporan Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 kepada Presiden telah diselesaikan pada 7 Mei 2026 sebagai outcome document Pertemuan AEC Council ke-27.
4.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan KTT ASEAN ke-48	Terlaksana	Persiapan substansi pertemuan KTT ASEAN ke-48 telah dilaksanakan pada 20 April 2026. Persiapan dilaksanakan melalui Rapat Stocktaking Isu Prioritas Pilar Ekonomi Indonesia untuk KTT ke-48 ASEAN yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.
4.	Menghadiri KTT ASEAN ke-48	Terlaksana	KTT ASEAN ke-48 telah dilaksanakan pada 7-9 Mei 2026 di Cebu, Filipina.
5.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	Persiapan substansi pertemuan KTT Istimewa BIMP-EAGA telah dilaksanakan pada 20 April 2026. Persiapan dilaksanakan

			melalui Rapat Stocktaking Isu Prioritas untuk KTT Istimewa BIMP-EAGA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.
6.	Menghadiri Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	BIMP-EAGA Summit ke-17 telah dilaksanakan 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Para Leaders memberikan arahan mengenai arah kerja sama subregional ke depannya dan menyetujui <i>Leaders Joint Statement</i> .
7.	Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	Pada KTT Istimewa BIMP-EAGA telah disepakati pernyataan bersama (<i>Leaders' Joint Statement</i>) yang berisi laporan perkembangan kerja sama BIMP-EAGA dan arahan serta kesepakatan para Kepala Negara.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Persiapan *Special AECC on Middle East Crisis* pada 27 April 2026.
2. Menghadiri Pertemuan *Special AECC on Middle East Crisis* pada 30 April 2026.
3. Menghadiri BIMPFC – BIMP-EAGA Special Summit Preparatory Meeting pada 29 April 2026.
4. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Kalimantan Barat oleh Kementerian Pariwisata pada 25 Mei 2026.
5. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan oleh Kementerian Pariwisata pada 26 Mei 2026.
6. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Papua Barat Daya oleh Kementerian Pariwisata pada 2 Juni 2026.
7. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian Pariwisata pada 2 Juni 2026.

8. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kementerian Pariwisata pada 4 Juni 2026.
9. Menghadiri Rapat Pleno Setnas ASEAN pada 11 Juni 2026.
10. Menyelenggarakan *BIMP-EAGA Economic Zones Working Group Establishment Under BIMP-EAGA Vision 2035 and Inception Meeting* pada 29 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang ikut menjadi DELRI pada pertemuan, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 40.300.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan forum kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan III-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Isu-isu yang dibahas pada Pertemuan AEC Council ke-27 bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dan konsolidasi posisi Indonesia dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.
2. Tindak lanjut kerja sama BIMP-EAGA melibatkan pemerintah daerah dan berbagai kementerian/lembaga pengampu, sehingga memerlukan koordinasi yang intensif untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi melalui rapat persiapan dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menyusun dan menyelaraskan posisi Indonesia dalam Pertemuan AEC Council ke-27.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan program BIMP-EAGA serta memastikan tindak lanjut hasil pertemuan dapat dilaksanakan secara efektif.

1.2. Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko

Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur persentase penyelesaian rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri *Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada saat Indonesia berperan sebagai *host country*. Penetapan indikator ini secara terpisah dari IKU efektivitas kerja sama ekonomi regional dilakukan untuk mencerminkan peningkatan peran, tanggung jawab, dan kompleksitas koordinasi Indonesia dalam penyelenggaraan forum PTM IMT-GT.

Sebagai *host*, Indonesia tidak hanya berperan dalam perumusan substansi kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan kesiapan agenda, koordinasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi pelaksanaan pertemuan, serta kesinambungan proses pengambilan keputusan di tingkat menteri. Oleh karena itu, penyelesaian rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ditetapkan sebagai indikator kinerja tersendiri yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kerja sama ekonomi regional.

IKU dinyatakan tercapai apabila seluruh rencana aksi Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT terlaksana. Adapun rencana aksi yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 dengan K/L terkait;
4. Penyusunan Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
5. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
6. Penyusunan Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
7. Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
8. Publikasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32; dan
9. IMT-GT Advisory Committee Meeting.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyelesaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi yang terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi yang ditargetkan (9)}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama

Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 40% ditentukan berdasarkan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2026 dan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT yang telah terealisasi sebesar 40% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT	Persentase	100%	40%	40% (memuaskan)

Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT merupakan *direct cascading* dari Indikator Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen. IKU ini ditargetkan sebesar 100%. Sampai dengan laporan ini disusun, komitmen yang disepakati pada kerja sama ekonomi regional telah terlaksana sebesar 40%.

Progress Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT pada triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 dengan K/L terkait

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan PTM IMT-GT yang akan dilaksanakan pada bulan September 2026 di Medan, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada 28 April 2026. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai diseminasi awal mengenai perubahan atas Keppres 13/2001 yang mengatur kerja sama subregional.

2. Menyusun Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32

Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Nasional turut mengikuti rapat-rapat persiapan yang diselenggarakan oleh masing-masing *focal point Working Group* dan memberikan pandangan terkait penyusunan posisi Indonesia pada *WG meeting* untuk dilaporkan pada PTM bulan September mendatang. Penyusunan kertas posisi masih akan berlanjut sampai TW III, diperkirakan sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2026.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2025. Realisasi triwulan II dapat tercapai sesuai dengan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2026 dimana beberapa forum kerja sama ekonomi regional telah mulai dilaksanakan maka diprediksikan Kerja Sama Ekonomi

Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati dapat terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 dengan K/L terkait	Terlaksana	Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 telah dilaksanakan pada 28-29 April 2026 di Bogor.
2.	Menyusun Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32	Terlaksana	Penyusunan posisi melalui beberapa WG meeting yang telah dilakukan: WG Environment dan WG Transport and Connectivity.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian juga mengadakan beberapa rapat koordinasi untuk menyelaraskan beberapa indikator dan basis pengukuran yang dipergunakan, seperti pertemuan antara BPS dengan Kementerian Pariwisata.
2. Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Nasional bertindak menggantikan Badan Karantina Indonesia sebagai Chair sementara pada pertemuan SWQ CIQ meeting dikarenakan belum ditunjuknya pejabat definitif pada BKI.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang hadir menjadi DELRI pada pertemuan, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam

kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 40.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan forum kerja sama ekonomi Regional yang akan dilakukan pada triwulan III-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum adanya kepastian besaran alokasi anggaran untuk penyelenggaraan PTM IMT-GT, sehingga proses perencanaan terhambat, menyebabkan tim tidak dapat bergerak untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya maupun kontrak pengadaan dengan pihak ketiga.
2. Pergeseran alokasi anggaran yang terjadi juga mengakibatkan Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Nasional tidak dapat menghadiri dan memberikan supervisi secara langsung pada pelaksanaan *Working Group Meeting* yang dilaksanakan di daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama untuk memperoleh kepastian alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan melalui rapat daring serta media komunikasi lainnya.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan**

Kerja Sama Ekonomi Regional

perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap tiga sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, yaitu:

- 1) Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - Penandatanganan DEFA;
 - Penyelesaian Substansial ACAFTA.
- 2) Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
 - Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2026 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
 - Joint Statement BIMP-EAGA Summit ke-17;
 - Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026
- 3) Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
 - Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA;
 - Pengesahan Protokol ASEAN-MNP.

Rekomendasi kebijakan yang dimaksud mencakup: penyelesaian komitmen yang telah disepakati, partisipasi aktif dalam forum regional, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil forum. Produk keluaran dari proses ini antara lain berupa: notula rapat, *policy brief*, dokumen rekomendasi kebijakan, laporan kegiatan, hingga laporan evaluasi kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 30% ditentukan

berdasarkan nasional kalender forum kerja sama Regional tahun 2026 dan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional yang telah terealisasi sebesar 30% atau mencapai dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85%	30%	35,29 % (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan *direct cascading* dari Indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85%.

Persentase Efektivitas merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pada kerja sama ekonomi Regional. Sampai dengan laporan ini disusun, penyelesaian komitmen, keikutsertaan pada forum, dan implementasi kebijakan pada kerja sama ekonomi Regional telah terlaksana sebesar 30%.

Progress capaian kinerja pada triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi PTA/FTA/CEPA

- Perundingan DEFA

Pada triwulan II telah dilaksanakan Pertemuan ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yaitu:

1. Pertemuan ASEAN DEFA *Negotiating Committee* (DEFA NC) ke-19 dan *Legal Experts Meeting* (LEM) for ASEAN DEFA putaran ke-3 pada 8-10 April 2026 secara virtual.
2. Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-20 pada 17 April 2026 secara virtual.
3. Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-21 pada 21-22 Mei 2026 secara virtual.

Pada 30 Mei 2026, ASEAN *Senior Economic Officials* (SEOM) mengumumkan selesainya seluruh negosiasi ASEAN DEFA, setelah seluruh isu yang masih tersisa berhasil diselesaikan. Keberhasilan ini menandai tercapainya kesepakatan atas ASEAN DEFA sebagai perjanjian ekonomi digital regional pertama ASEAN. Per 26 Juni 2026, Naskah akhir ASEAN DEFA telah selesai melalui proses *legal scrubbing* dan memasuki tahap *endorsement* sebagai tahapan akhir sebelum penandatanganan.

- **Perundingan ACAFTA**

Pertemuan ASEAN-Canada *Free Trade Agreement Trade Negotiating Committee* (ACAFTA-TNC) ke-18 telah dilaksanakan pada 21 s.d. 24 April 2026 di Sekretariat ASEAN dan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN (AMS), Kanada dan Sekretariat ASEAN. Beberapa agenda penting yang dibahas mencakup: (i) *Substantial Conclusion of ACAFTA*; (ii) *Authentic Text*, (iii) *Indigenous People*; (iv) *Competitive Neutrality*; (v) *Cultural Industries*; (vi) *Reports of Subsidiary Bodies*; serta (vii) *Financial and Technical Assistance*.

Hingga Pertemuan TNC ke-18, progress perundingan teks telah mencapai 65,1% dengan tambahan penyelesaian 2 (dua) bab, yaitu *Trade Remedies* (TR) dan *Institutional Provisions and General Definitions* (IPGD). Sementara untuk perundingan akses pasar telah memasuki tahapan krusial untuk perdagangan barang, jasa dan TMNP sedangkan untuk jasa finansial baru akan memasuki tahapan *second offer*.

2. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

- **Pertemuan AEC Council ke-27**

Pertemuan ASEAN *Economic Community* (AEC) Council telah dilaksanakan dalam rangkaian KTT ASEAN ke-48 pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Pertemuan dipimpin oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026 dan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku AEC Council Indonesia. Turut hadir menjadi delegasi RI yakni perwakilan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian dengan K/L terkait dari hasil pertemuan antara lain:

1. Berkoordinasi dan mengawal perkembangan dinamika global.
2. Memantau dan mengawal implementasi PED *Chairship* Filipina 2026 agar tercapai sesuai target.

3. Berkoordinasi di tingkat nasional dan menyelesaikan *pending issues AEC agreements* serta mengawal implementasi *spill-over activities* di tahun 2026.
4. Berkoordinasi dalam monitoring implementasi *Annual Milestone Deliverables* dan *Key Outcome Indicators* serta dalam penyempurnaan Kalender AEC melalui *Implementation Plan* dan *Roadmap*.
5. Berkoordinasi untuk mengawal implementasi agenda keberlanjutan di kawasan.
6. Berkoordinasi dalam isu transformasi digital di kawasan.
7. Berkoordinasi secara intensif untuk mengawal proses akses Timor Leste terhadap perjanjian ekonomi ASEAN dan menindaklanjuti mandat AFM terkait 2 (dua) rekomendasi AMM.
8. Berkoordinasi dalam penyelesaian perundingan DEFA.
9. Berkoordinasi mengawal proses penandatanganan MoU yang ditargetkan tahun 2026 dan penyusunan rencana implementasi.

- **BIMP-EAGA Special Summit ke-17**

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istimewa BIMP-EAGA ke-17 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina, dipimpin oleh Presiden Filipina.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang didampingi oleh Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri ESDM, dan Menteri Sekretaris Kabinet.

Terdapat 2 (dua) agenda penting dalam KTT BIMP-EAGA yaitu:

1. Laporan Perkembangan kerja sama BIMP-EAGA oleh Menteri Filipina mewakili menteri BIMP-EAGA lainnya. Pertemuan bertujuan untuk mendukung Dokumen *Guideline Framework* BIMP-EAGA untuk sepuluh tahun ke depan dalam kerangka BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035.
2. Arahan dan Kesepakatan para Kepala Negara.

3. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian

- **Harmonisasi RPerpres Protokol Kedua AANZFTA**

Penyelesaian RPerpres Protokol Kedua AANZFTA tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah pada Tahun 2026 dalam rangka penyelesaian proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Meskipun proses harmonisasi telah dilaksanakan pada tahun 2025, pada Tahun 2026 dilakukan tindak lanjut penyelesaian proses ratifikasi sesuai tahapan yang berlaku hingga siap untuk ditandatangani oleh Presiden.

- **Harmonisasi RPerpres Protokol ASEAN-MNP**

Pada Triwulan II telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Amend the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (ASEAN-MNP) pada 17 April 2026. Rapat harmonisasi dilaksanakan

sebagai tindak lanjut permohonan pengharmonisasian RPerpres ASEAN-MNP dan merupakan bagian dari tahapan penyelesaian proses ratifikasi sebelum penetapan RPerpres.

Proyeksi Triwulan II tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan II tahun 2025. Realisasi Triwulan dapat tercapai sesuai dengan nasional kalender forum kerja sama Regional tahun 2026 dan diprediksikan akan terus terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Legal Scrubbing DEFA	Terlaksana	<i>Legal Experts Meeting (LEM)</i> for ASEAN DEFA putaran ke-3 telah dilaksanakan pada 8-10 April 2026 secara virtual.
2.	Perundingan ACAFTA	Terlaksana	Pertemuan ASEAN-Canada <i>Free Trade Agreement Trade Negotiating Committee (ACAFTA-TNC)</i> ke-18 telah dilaksanakan pada 21-24 April 2026 di Sekretariat ASEAN.
3.	Menyusun Kertas Posisi Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Penyusunan kertas posisi telah diselesaikan untuk mendukung Pertemuan AEC Council ke-27 pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina.

4.	Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Laporan Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 kepada Presiden telah diselesaikan pada 7 Mei 2026 sebagai outcome document Pertemuan AEC Council ke-27.
5.	Menindaklanjuti Hasil Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Berkoordinasi dengan K/L terkait mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil pertemuan AEC Council ke-27. Laporan rekomendasi kepada K/L telah disampaikan melalui Berita Faksimili Nomor B-00138/Manila/260519 pada tanggal 19 Mei 2026.
6.	Publikasi Hasil Pertemuan AEC Council ke-27	Terlaksana	Publikasi telah dilaksanakan melalui penyampaian Berita Biasa dalam bentuk Berita Faksimili Nomor B-00138/Manila/260519 pada tanggal 19 Mei 2026 serta siaran pers pada website Kemenko Perekonomian.
7.	Menyusun Kertas Posisi Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	Penyusunan kertas posisi telah diselesaikan untuk mendukung Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17 pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina.
8.	Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	Pada KTT Istimewa BIMP-EAGA telah disepakati pernyataan bersama (<i>Leaders' Joint Statement</i>) yang berisi laporan perkembangan

			kerja sama BIMP-EAGA dan arahan serta kesepakatan para Kepala Negara.
9.	Menindaklanjuti Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	Laporan rekomendasi kepada K/L telah disampaikan melalui Berita Faksimili Nomor B-00138/Manila/260519 pada tanggal 19 Mei 2026.
10.	Publikasi Hasil Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-17	Terlaksana	Publikasi telah dilaksanakan melalui penyampaian Berita Biasa dalam bentuk Berita Faksimili Nomor B-00138/Manila/260519 pada tanggal 19 Mei 2026 serta siaran pers pada website Kemenko Perekonomian.
11.	Harmonisasi RPerpres Protokol Kedua AANZFTA	Terlaksana	Proses harmonisasi telah dilaksanakan sejak tahun 2025, pada tahun 2026 dilakukan tindak lanjut penyelesaian proses ratifikasi sesuai tahapan yang berlaku hingga siap untuk ditandatangani oleh Presiden.
12.	Harmonisasi RPerpres Protokol ASEAN-MNP	Terlaksana	Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol ASEAN-MNP telah dilaksanakan pada 17 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Persiapan Special AECC on Middle East Crisis pada 27 April 2026.

2. Menghadiri BIMPFC – BIMP-EAGA Special Summit Preparatory Meeting pada 29 April 2026.
3. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Kalimantan Barat oleh Kementerian Pariwisata pada 25 Mei 2026.
4. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan oleh Kementerian Pariwisata pada 26 Mei 2026.
5. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Papua Barat Daya oleh Kementerian Pariwisata pada 2 Juni 2026.
6. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian Pariwisata pada 2 Juni 2026.
7. Diskusi Program BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kementerian Pariwisata pada 4 Juni 2026.
8. Menghadiri Rapat Pleno Setnas ASEAN pada 11 Juni 2026.
9. Menyelenggarakan *BIMP-EAGA Economic Zones Working Group Establishment Under BIMP-EAGA Vision 2035 and Inception Meeting* pada 29 Juni 2026
10. Menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Posisi Indonesia pada Pertemuan Intersesi ASEAN-Canada FTA *Trade Negotiating Committee* (ACAFTA-TNC) Meeting 6 April 2026.
11. Menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Posisi Indonesia pada the 18th ASEAN-Canada FTA *Trade Negotiating Committee* (ACAFTA-TNC) *Meeting and Related Meetings* pada 16 April 2026.
12. Menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Posisi ASEAN Canada FTA TNC ke-19 pada 25 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang ikut menjadi DELRI pada pertemuan, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 40.300.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan forum kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan III-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Isu-isu yang dibahas pada Pertemuan AEC Council ke-27 bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dan konsolidasi posisi Indonesia dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.
2. Tindak lanjut kerja sama BIMP-EAGA melibatkan pemerintah daerah dan berbagai kementerian/lembaga pengampu, sehingga memerlukan koordinasi yang intensif untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Penyelesaian tahapan negosiasi maupun ratifikasi bergantung pada kesepakatan bersama antarnegara anggota serta penyelesaian proses

sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga terdapat beberapa tahapan yang berada di luar kendali langsung Kemenko Perekonomian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi melalui rapat persiapan dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menyusun dan menyelaraskan posisi Indonesia dalam Pertemuan AEC Council ke-27.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan program BIMP-EAGA serta memastikan tindak lanjut hasil pertemuan dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun dan menyelaraskan posisi Indonesia dalam proses negosiasi serta penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
4. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan penyelesaian negosiasi dan proses ratifikasi bersama kementerian/lembaga teknis serta Sekretariat ASEAN guna memastikan setiap tahapan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan; (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan

empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Kepuasan} \\ \text{Layanan Koordinasi,} \\ \text{Sinkronisasi dan} \\ \text{Pengendalian} \end{array} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 3 dari 4 yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam pelayanan unit kerja dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional telah terealisasi sebesar 3,7 dari 4 atau mencapai 120% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Indeks	3 dari 4	3,7 dari 4	120% (Memuaskan)

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional pada tahun 2026 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah melakukan survei Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan II tahun 2026. Berdasarkan penarikan hasil survei, diperoleh indeks kepuasan sebesar 3,7 artinya telah mencapai 120% dari target Baik (3 dari 4).

Proyeksi Triwulan II tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan II tahun 2025. Realisasi Triwulan II didorong oleh tingginya partisipasi aktif K/L mitra kerja dalam mengisi survei, sehingga data yang diperoleh menggambarkan persepsi dan pengalaman nyata mereka dalam berkoordinasi dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara online dengan mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan survei dan pengisian jawaban, serta rekapitulasi hasil survei karena dilakukan secara serentak dalam satu tempat dan rentang waktu yang sama.

Responden diberikan petunjuk mengenai tata cara pengisian survei guna meminimalisir kesalahan teknis pada waktu mengisi kuesioner tersebut. Hasil pelaksanaan survei yakni berupa nilai indeks kepuasan yang diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah dilengkapi oleh responden, dengan empat kategori penilaian yakni (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Hasil dari pelaksanaan survei tersebut berupa tindaklanjut atas perbaikan layanan.

Adapun responden yang telah berpartisipasi pada survei ini adalah seluruh pejabat/pegawai baik ASN maupun Non ASN di lingkungan Kemenko Perekonomian, K/L dan/atau stakeholder terkait . Namun survei ini dikecualikan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan objektivitas penilaian survei.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi dan pemetaan kendala koordinasi lintas K/L serta rencana perbaikan kerja sama ekonomi regional	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi dan pemetaan kendala koordinasi lintas kementerian/ lembaga berdasarkan hasil survei kepuasan layanan dan pelaksanaan koordinasi kerja sama ekonomi regional sebagai bahan penyusunan

			rekomendasi perbaikan.
2.	Penguatan <i>engagement stakeholder</i> melalui peningkatan kualitas partisipasi dalam forum koordinasi kerja sama ekonomi regional	Terlaksana	Telah dilakukan penguatan <i>engagement</i> pemangku kepentingan melalui peningkatan partisipasi dalam forum koordinasi kerja sama ekonomi regional serta tindak lanjut atas masukan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan.
3.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan II	Terlaksana	Survei kepuasan layanan Triwulan II telah dilaksanakan dan hasilnya telah diolah serta disusun dalam laporan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah diantaranya:

1. Menyebarkan form survei sebanyak-banyaknya kepada K/L terkait agar diperoleh minimal 20 responden.
2. Melakukan reminder secara berkala kepada responden survei untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan *Google Form*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp250.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja bahan sebagai penunjang kebutuhan kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan III-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tingkat partisipasi responden dalam pengisian survei belum optimal sehingga diperlukan upaya tindak lanjut untuk memperoleh jumlah responden yang memadai.
2. Perbedaan tingkat pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kerja sama ekonomi regional memerlukan penyamaan persepsi secara berkelanjutan agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan pengingat (*reminder*) dan koordinasi secara berkala kepada responden selama periode pelaksanaan survei.
2. Meningkatkan *engagement* dengan kementerian/lembaga melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif guna mendorong partisipasi aktif dalam survei maupun forum koordinasi kerja sama ekonomi regional.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional
Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%, dengan penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 40% ditetapkan berdasarkan tren progress atas cascading dari Program Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 43,47% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	92%	40%	43,47 % (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional ditargetkan sebesar 92%. Sampai dengan laporan ini disusun, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah terealisasi sebesar 40%.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2025. Realisasi triwulan II didorong oleh pemenuhan cascading atas target Reformasi Birokrasi dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Mengingat hal tersebut, maka diprediksikan target penyelenggaraan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dapat terpenuhi di triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan)

			pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan II.
2.	Penyusunan Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Revisi Renja Tahun 2026 di TW II 2026.
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama triwulan II.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian capaian E-monev Renja triwulan II.
2. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian triwulan II bagi seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan pelaksanaan rapat pembahasan di dalam kantor atau *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp250.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja bahan sebagai penunjang kebutuhan kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan III-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses penyusunan dokumen pelaporan kinerja memerlukan koordinasi dan konsolidasi data antarbidang kerja sama di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional untuk memastikan kesesuaian substansi dan target kinerja.

2. Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan persuratan dan disposisi belum optimal, sehingga sebagian proses disposisi masih dilakukan secara manual melalui media komunikasi lain.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antarbidang kerja sama dalam penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja guna memastikan ketepatan waktu dan kualitas dokumen yang dihasilkan.
2. Mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan persuratan dan disposisi melalui sosialisasi, pendampingan, serta penerapan secara konsisten di lingkungan unit kerja.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional



Bobby Chriss Siagian